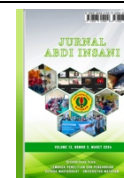




JURNAL ABDI INSANI

Volume 13, Nomor 3, Maret 2026

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



PELATIHAN FASILITATOR LAPANGAN PROGRAM BSPS DI PROVINSI GORONTALO

BSPS Program Field Facilitator Training in Gorontalo Province

Ratna Dwi Ma'sum*, Mifidyah Putri Palilati, Yohanes P Erick, Rizky Selly Nazarina Olii

Program Studi Arsitektur, Universitas Gorontalo

Jalan Achmad A. Wahab No.247 Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

*Alamat korespondensi: ratnadwimaksum@unigo.ac.id

(Tanggal Submission: 24 November 2025, Tanggal Accepted : 20 Maret 2026)



Kata Kunci :

*Pelatihan,
Fasilitator
Lapangan,
Program BSPS*

Abstrak :

Kegiatan pelatihan teknis bagi calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo dilaksanakan sebagai respons terhadap tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan tantangan implementasi program di lapangan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas fasilitator dalam memahami kebijakan BSPS, standar teknis rumah layak huni serta keterampilan komunikasi dan pendampingan masyarakat. Metode pelatihan dirancang secara partisipatif dan kontekstual terdiri dari penyampaian materi interaktif dan praktik lapangan selama dua hari. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, baik secara teknis maupun sosial, yang tercermin dari skor pretest-posttest dan observasi praktik lapangan. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung efektif dalam membentuk fasilitator yang profesional dan adaptif terhadap kondisi lokal. Pelatihan ini direkomendasikan untuk direplikasi dengan penyesuaian konteks wilayah dan durasi yang lebih optimal guna mendukung keberhasilan program BSPS secara berkelanjutan.

Key word :

*Training, Field
Facilitators,
BSPS Program*

Abstract :

Technical training for prospective Field Facilitators (TFL) of the Self Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in Gorontalo Province was conducted in response to the high number of uninhabitable houses and challenges in implementing the program in the field. The main objective of this activity was to improve the capacity of facilitators in understanding BSPS policies, technical standards for livable houses, and communication and community assistance skills. The training method was designed to be participatory and contextual, consisting of interactive material delivery and two days of field practice. The evaluation results showed a significant increase in the



participants knowledge and skills, both technical and social, as reflected in the pretest–posttest scores and field practice observations. The conclusion of this activity confirms that practice-based training is effective in developing professional facilitators who are adaptive to local conditions. This training is recommended to be replicated with adjustments to the regional context and a more optimal duration to support the sustainable success of the BSPS program.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Ma'sum, R. D., Palilati, M. P., Erick, Y. P., & Olii, R. S. N. (2026). Pelatihan Fasilitator Lapangan Program BspS di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Abdi Insani*, 13(3), 1742-1751. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i3.3607>

PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Di Indonesia masalah kesenjangan akses terhadap rumah layak huni memang masih menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, permasalahan rumah tidak layak huni tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, hal ini mencerminkan kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat (Tobing & Wisana, 2024). Berdasarkan basis data E-RTLH nasional Kementerian PUPR tahun 2025, sekitar 3.829.973 unit rumah dinyatakan tidak layak huni yang didasarkan pada lima kriteria indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi serta akses air minum yang bersih dan akses terhadap pencahayaan dan penghawaan bangunan yaitu pencahayaan 10% dari luas lantai dan penghawaan 5% dari luas lantai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu inisiatif strategis dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka sesuai dengan standar rumah layak huni. Program BSPS didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan stimulan dimana pemerintah memberikan dana bantuan dan bimbingan teknis, sementara masyarakat penerima bantuan melaksanakan pembangunan secara mandiri (swadaya) dengan didukung oleh semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia (Herawati *et al.*, 2023).

Pelaksanaan Program BSPS memerlukan dukungan sistem pendampingan yang kuat dan efektif di tingkat lapangan. Dalam struktur implementasinya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) atau Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kesuksesan program (Silaban & Ritonga, 2024). Perekrutan tenaga fasilitator lapangan biasanya mencakup beberapa syarat ketentuan diantaranya; warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki dedikasi yang tinggi dan jiwa sosial untuk membantu masyarakat, bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan, bersedia bekerja penuh waktu (fulltime) selama masa kontrak, mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office seperti Word, Excel dan Power Point, memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi dan diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan, selain itu TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik dan pemberdayaan selain itu TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pelatihan atau pembekalan sebelum ditugaskan sesuai perintah kerja atau kontrak (Perkim, 2022). Peran TFL mencakup serangkaian tugas kompleks mulai dari tahap sosialisasi program kepada masyarakat, identifikasi calon penerima bantuan, bimbingan teknis penyusunan proposal, supervisi pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan akhir program (Fitriah & Witanti, 2023). Dengan tugas dan tanggung jawab yang beragam ini kapasitas dan kompetensi SDM TFL menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan program, untuk itu Pelatihan tenaga fasilitator lapangan merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan



Swadaya (BSPS) karena fasilitator berperan sebagai penghubung teknis, pengawas kualitas dan pendamping masyarakat penerima bantuan untuk mewujudkan hunian yang layak (Tasmiatun, 2024). Berbagai evaluasi program BSPS menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan kemampuan pendampingan fasilitator menentukan keberhasilan output fisik dan partisipasi komunitas, sementara kelemahan dalam pembekalan sering berujung pada standar konstruksi yang tidak konsisten dan rendahnya keberlanjutan intervensi setelah bantuan selesai. Penelitian tentang desain pelatihan, modul kompetensi dan model pendampingan yang efektif selama beberapa dekade terakhir menekankan perlunya pendekatan pelatihan terintegrasi yang menggabungkan aspek teknis konstruksi, komunikasi komunitas, akuntabilitas program dan adaptasi lokal terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi setempat (Qalbi & Adnan, 2025).

Provinsi Gorontalo memiliki urgensi khusus dalam hal kebutuhan perumahan layak huni. Sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dan infrastruktur perumahan yang heterogen, Gorontalo menjadi sasaran implementasi Program BSPS pada berbagai tahun anggaran. Data menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir, alokasi bantuan BSPS di Gorontalo telah mencakup ratusan unit rumah yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kemampuan TFL dalam memahami konteks lokal, mengkomunikasikan kebijakan program kepada masyarakat serta membimbing penerima bantuan dalam proses pembangunan rumah (Dwi *et al.*, 2025). Pengalaman pelaksanaan BSPS di Gorontalo menunjukkan bahwa tantangan utama sering kali terletak pada aspek pendampingan lapangan. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain pemahaman yang masih terbatas mengenai mekanisme program, keterbatasan kemampuan teknis dalam memberikan bimbingan konstruksi, kesulitan dalam memfasilitasi koordinasi antara pihak-pihak terkait dan kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan teknis bagi fasilitator lapangan menjadi relevan sebagai upaya memperkuat kapasitas SDM yang terlibat dalam implementasi Program BSPS (Panyue *et al.*, 2022). Sejalan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat dan community development, pelatihan bagi tenaga pendamping telah diakui sebagai komponen kritis dalam kesuksesan program-program sosial dan pembangunan karena dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi tenaga fasilitator yang terlibat (Astari *et al.*, 2022). Kompetensi yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek pengetahuan teknis tentang standar rumah layak huni, namun juga keterampilan sosial seperti komunikasi dialogis, fasilitasi partisipatif, resolusi konflik serta kemampuan untuk memotivasi dan mengorganisir masyarakat (Adha, 2017). Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya (TPMPS) telah menetapkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan mencakup tiga kelompok utama, yaitu kompetensi umum seperti komunikasi, etika profesional dan pengembangan diri, kompetensi inti terkait dengan pemahaman program, perencanaan dan pelaksanaan dan kompetensi khusus yang disesuaikan dengan konteks spesifik wilayah dan program. Pengembangan kompetensi ini memerlukan pendekatan pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan dan berorientasi pada praktik lapangan. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis yang dirancang khusus bagi fasilitator mampu meningkatkan kualitas pendampingan dan pada gilirannya meningkatkan kesuksesan pelaksanaan program. Pelatihan yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi tentang mekanisme program tetapi juga membangun kapasitas fasilitator dalam melakukan analisis situasi lokal, merancang strategi pendampingan yang kontekstual serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program secara sistematis (Rumampuk *et al.*, 2021).

Tujuan dari kegiatan pelatihan fasilitator lapangan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga fasilitator dalam memahami kebijakan dan standar teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan fasilitasi yang efektif dengan masyarakat penerima manfaat. Dengan pelatihan ini diharapkan fasilitator mampu memberikan pendampingan yang tepat, akurat dan berkelanjutan sehingga proses pembangunan atau

perbaikan rumah layak huni dapat berjalan sesuai standar, tepat sasaran serta meningkatkan partisipasi aktif komunitas lokal dalam program (Sugianto *et al.*, 2024). Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual kepada fasilitator terkait kondisi sosial ekonomi dan geografis wilayah Gorontalo sehingga intervensi dapat disesuaikan dan berdampak maksimal. Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana membekali tenaga fasilitator lapangan dengan kompetensi teknis dan sosial yang memadai dalam waktu singkat melalui pelatihan yang efektif, guna mengatasi hambatan implementasi program BSPS di Gorontalo seperti keterbatasan pemahaman mekanisme program, rendahnya kemampuan teknis supervisi konstruksi dan kurangnya keterampilan komunikasi yang mendukung pendampingan masyarakat. Kegiatan ini juga berupaya menciptakan model pelatihan yang dapat diterapkan secara praktis untuk mendukung suksesnya pelaksanaan BSPS di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang beragam.

METODE KEGIATAN

Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan konsep partisipatif yang menggabungkan teori dan praktik secara efisien dalam dua hari. Hari pertama difokuskan pada penyampaian materi inti meliputi kebijakan BSPS, standar rumah layak huni, teknik fasilitasi dan komunikasi efektif dengan masyarakat. Materi disampaikan secara interaktif untuk membangun pemahaman komprehensif peserta terkait peran dan tugas fasilitator di lapangan. Hari kedua ditujukan untuk praktik langsung di lapangan dengan pendampingan pada salah satu rumah masyarakat kurang mampu. Pendekatan ini memungkinkan peserta mengaplikasikan pengetahuan teknis dan keterampilan komunikasi yang telah diperoleh secara nyata, sekaligus mengasah kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis. Metode singkat ini dirancang sesuai karakteristik fasilitator dan kebutuhan lokal agar hasil pelatihan maksimal dalam waktu terbatas.

Pelaksanaan pelatihan fasilitator lapangan (TFL) untuk Program BSPS Provinsi Gorontalo menggunakan pendekatan yang sistematis dan partisipatif. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yang dilakukan melalui survei, wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan koordinator dan fasilitator di lapangan, guna mengidentifikasi gap kompetensi dan kebutuhan lokal. Selanjutnya desain program pelatihan disusun berdasarkan hasil analisis tersebut, dengan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar relevan dan efektif secara kontekstual. Pengembangan perangkat pelatihan meliputi penyusunan modul materi, panduan fasilitator dan instrumen evaluasi yang kemudian divalidasi oleh PPK Dinas Perumahan dan Permukiman untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dalam dua hari, hari pertama berisi penyampaian materi secara interaktif mengenai standar rumah layak huni, teknik fasilitasi dan komunikasi efektif, sedangkan hari kedua digunakan untuk praktik langsung di lapangan dengan pendampingan pada salah satu rumah masyarakat kurang mampu. Teknik evaluasi berbasis model Kirkpatrick digunakan untuk mengukur tingkat reaksi, pengetahuan, perilaku dan hasil dari pelatihan. Data dikumpulkan melalui pretest dan posttest, observasi langsung serta wawancara, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif guna menilai keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa fasilitator tidak hanya memahami aspek teknis tetapi juga mampu menerapkan teknik fasilitasi dan komunikasi efektif sesuai konteks lokal Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan fasilitator lapangan (TFL) untuk Program BSPS di Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil positif dalam peningkatan kompetensi peserta. Secara umum, para fasilitator yang mengikuti pelatihan mampu memahami standar rumah layak huni, teknik fasilitasi serta komunikasi efektif dengan masyarakat penerima manfaat. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 35% yang mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan teknis dan kemampuan komunikasi peserta setelah mengikuti pelatihan. Observasi langsung di



lapangan juga menunjukkan bahwa fasilitator mampu melakukan pendampingan secara langsung di salah satu rumah masyarakat kurang mampu dengan prosedur sesuai standar dan mampu mengedukasi masyarakat terkait proses pembangunan rumah layak huni. Keterampilan dokumentasi dan pengumpulan data lapangan yang penting juga berhasil ditingkatkan hal ini terbukti dari keberhasilan peserta dalam mendokumentasikan kondisi rumah dari berbagai sudut dan bagian secara detail. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rumampuk *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung dan simulasi di lapangan mampu meningkatkan kapasitas fasilitator secara signifikan dan berkelanjutan. Beberapa hambatan tetap ditemukan selama pelaksanaan seperti keterbatasan waktu pelatihan yang singkat sehingga tidak semua peserta mendapatkan pengalaman praktik yang memadai dan kendala terkait kemampuan komunikasi peserta yang beragam latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan. Kendala lain yang signifikan adalah pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme program dan standar teknis konstruksi yang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan. Secara keseluruhan data dan pengamatan menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif meningkatkan kapasitas fasilitator namun perlu ada upaya penguatan dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pendampingan di lapangan bahwa peningkatan kapasitas fasilitator menjadi kunci utama keberhasilan program penanganan rumah tidak layak huni secara berkelanjutan (Utomo & Aji, 2024). Data mengenai jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo. Informasi kuantitatif tentang distribusi RTLH di berbagai kabupaten dan kota dalam provinsi ini berguna untuk menentukan prioritas intervensi serta alokasi sumber daya secara tepat dan efisien. Dengan memahami besarnya kebutuhan perbaikan rumah layak huni, program BSPS dapat dieksekusi dengan fokus pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan dampak sosial ekonomi dari program. Tabel berikut menyajikan data jumlah RTLH di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 berdasarkan basis data nasional sebagai gambaran awal kondisi perumahan yang harus diatasi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Wilayah Provinsi Gorontalo	Jumlah RTLH (Unit) 42.474
1	Kabupaten Gorontalo	16.730
2	Kabupaten Boalemo	4.834
3	Kabupaten Bone Bolango	10.678
4	Kabupaten Pohuwato	3.862
5	Kabupaten Gorontalo Utara	3.560
6	Kota Gorontalo	2.810

Sumber : Data E-RTLH Kemenpupr

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat total 42.474 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo, dengan distribusi yang tidak merata antarwilayah. Kabupaten Gorontalo mencatat angka tertinggi yakni 16.730 unit, diikuti Kabupaten Bone Bolango 10.678 unit, kedua kabupaten tersebut menyumbang hampir dua per tiga dari keseluruhan kebutuhan perbaikan. Kabupaten Boalemo 4.834 unit, Kabupaten Pohuwato 3.862 unit, Kabupaten Gorontalo Utara 3.560



unit dan Kota Gorontalo 2.810 unit memiliki jumlah yang lebih kecil secara tetapi tetap signifikan bagi perencanaan program. Sebaran ini menandakan perlunya pendekatan intervensi yang terprioritas dan berbeda antar wilayah, fokus skala besar di daerah dengan konsentrasi tinggi RTLH serta penyesuaian metode pelaksanaan di kota versus kawasan kabupaten untuk memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan keberlanjutan hasil perbaikan. Tabel jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo memberikan gambaran jelas tentang distribusi kebutuhan perbaikan rumah yang menjadi fokus utama program BSPS. Data ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang bertugas melakukan pendampingan dan supervisi secara langsung di lapangan. Dengan memahami sebaran dan volume RTLH secara rinci, para fasilitator dapat merancang strategi pendampingan yang lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mendukung pencapaian target perbaikan rumah sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pelatihan teknis bagi calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan tahapan penting dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat langsung dalam implementasi Program BSPS, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap mekanisme program tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan teknis konstruksi, kemampuan komunikasi sosial serta etika pendampingan masyarakat (Astuti et al., 2023). Dalam konteks lokasi Provinsi Gorontalo, pelatihan ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan kompleksitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat penerima bantuan sehingga pelatihan dirancang secara partisipatif dan kontekstual melibatkan pemateri dari unsur teknis, akademik dan praktisi lapangan agar peserta mampu menjalankan peran mereka secara efektif dan berintegritas.



Gambar 1. Foto Bersama Pemateri dan Peserta Calon Tenaga Fasilitator Lapangan

Gambar di atas memperlihatkan momen kebersamaan antara pemateri dan peserta dalam kegiatan pelatihan calon TFL. Suasana yang tercipta menunjukkan semangat kolaboratif dan antusiasme peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Gestur tangan berbentuk hati yang ditampilkan oleh sebagian besar peserta mencerminkan semangat solidaritas dan komitmen untuk mendampingi masyarakat dengan empati dan profesionalisme. Kehadiran berbagai elemen dalam pelatihan ini mulai dari materi teknis, diskusi kelompok hingga simulasi lapangan menjadi fondasi penting dalam membentuk fasilitator yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga mampu membangun hubungan sosial yang konstruktif dengan warga penerima manfaat. Dokumentasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatihan tidak hanya bersifat formal tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun kapasitas lokal. Salah satu komponen penting dalam pelatihan teknis fasilitator lapangan adalah penguatan keterampilan komunikasi dan kemampuan melakukan pendataan sosial secara partisipatif. Dalam konteks Program BSPS, fasilitator tidak hanya bertugas menyampaikan informasi teknis tetapi juga harus mampu membangun dialog yang produktif dengan masyarakat, menggali kebutuhan secara akurat serta menyusun data calon penerima manfaat secara sistematis dan transparan. Sesi pelatihan dirancang untuk menyimulasikan situasi lapangan

yang nyata dimana peserta belajar menyusun daftar pertanyaan, melakukan wawancara sosial dan memahami dinamika komunikasi komunitas yang beragam.



Gambar 2. Peserta Belajar Cara Komunikasi, Mengajukan Daftar Pertanyaan dan Pendataan Informasi Calon Penerima Manfaat

Kegiatan praktik lapangan oleh peserta fasilitator memperlihatkan suasana pelatihan yang berlangsung dalam setting informal dan inklusif, dimana peserta duduk bersama dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan berlatih menyusun instrumen pendataan. Aktivitas ini bertujuan membangun keterampilan fasilitator dalam mengidentifikasi kebutuhan warga secara empatik dan kontekstual. Interaksi yang terjadi menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) sangat efektif dalam membentuk pemahaman peserta terhadap tantangan komunikasi di lapangan. Melalui simulasi ini peserta tidak hanya memahami teknik bertanya dan mencatat informasi tetapi juga belajar membangun kepercayaan dengan masyarakat, yang merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program berbasis pemberdayaan seperti BSPS. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada pengembangan kapasitas sosial fasilitator agar mampu menjalankan peran mereka secara holistik.

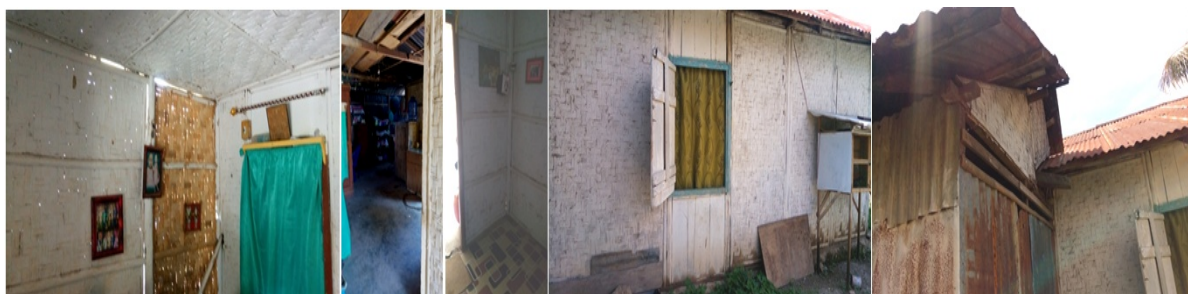
Dalam pelatihan teknis Program BSPS, kemampuan dokumentasi visual menjadi keterampilan wajib bagi setiap Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Dokumentasi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan alat verifikasi kondisi rumah yang menentukan kelayakan penerima bantuan dan jenis intervensi yang dibutuhkan. Pada sesi pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan fotografi dasar menggunakan kamera ponsel maupun digital, termasuk teknik pengambilan gambar yang sistematis, pencahayaan yang cukup dan sudut pengambilan yang representatif, peserta juga dilatih untuk menginput data koordinat lokasi rumah secara akurat menggunakan fitur GPS atau aplikasi pemetaan agar setiap unit RTLH dapat teridentifikasi secara spasial dan terintegrasi dalam sistem pelaporan nasional.



Gambar 3. Peserta Belajar Cara Mendokumentasikan 4 Tampak Sisi Bangunan Rumah

Gambar ini memperlihatkan hasil praktik peserta dalam mendokumentasikan empat sisi bangunan rumah secara lengkap depan, kiri, belakang dan kanan. Setiap foto diambil dengan memperhatikan komposisi visual yang jelas, jarak yang sesuai dan sudut yang memperlihatkan struktur bangunan secara utuh. Dalam sesi ini fasilitator juga dilatih untuk mencatat kondisi fisik bagian rumah seperti jenis dan kondisi atap misalnya seng berkarat, genteng retak, lantai tanah, semen, keramik rusak serta bagian dinding apakah papan lapuk, bata tanpa plester serta ada retakan struktural lainnya.

Informasi ini digunakan untuk menilai tingkat kerusakan rumah berdasarkan kategori ringan, sedang atau berat sesuai pedoman teknis BSPS. Penilaian ini penting karena menentukan besaran bantuan, jenis material yang dibutuhkan dan strategi pendampingan yang akan diterapkan. Dengan latihan ini peserta tidak hanya mahir dalam dokumentasi visual tetapi juga memahami bagaimana data visual dan spasial berkontribusi langsung terhadap validasi program dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini memperkuat profesionalisme TFL sebagai ujung tombak verifikasi teknis dan sosial dalam program perumahan swadaya. Dalam pelatihan teknis Program BSPS fasilitator lapangan tidak hanya dituntut untuk mengambil gambar dari sisi luar bangunan tetapi juga harus mampu mendokumentasikan bagian dalam rumah secara detail, termasuk atap, lantai dan dinding. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat mengenali ciri-ciri kerusakan struktural dan non struktural serta mengidentifikasi apakah rumah tersebut masuk dalam kategori rusak ringan, sedang atau berat. Peserta juga dilatih untuk mencatat informasi spesifikasi teknis seperti jenis material, tingkat keausan dan potensi bahaya yang mungkin timbul sehingga data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan.



Gambar 4. Belajar Mendokumentasikan Sudut Bagian Rumah, Baik Kondisi di Dalam dan di Luar Rumah Secara Detail Serta Melihat Bagian Atap, Lantai dan Dinding

Hasil praktik peserta dalam mendokumentasikan berbagai sudut rumah, baik dari sisi luar maupun bagian dalam, terlihat bahwa peserta mengambil foto detail dari dinding yang terbuat dari papan kayu dengan kondisi lapuk, atap seng yang menunjukkan tanda-tanda karat dan kebocoran serta lantai yang sebagian masih berupa tanah atau semen kasar. Setiap foto diambil dengan sudut yang memperlihatkan kondisi aktual bangunan sehingga memudahkan proses klasifikasi kerusakan. Dalam sesi ini peserta juga dilatih untuk mencatat kondisi pencahayaan dan penghawaan serta mengidentifikasi risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin muncul akibat kondisi fisik rumah. Pendekatan ini bertujuan agar fasilitator mampu menyusun laporan teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan jenis intervensi yang sesuai apakah cukup dengan perbaikan ringan atau membutuhkan renovasi menyeluruh. Dengan latihan ini peserta tidak hanya memahami aspek teknis dokumentasi tetapi juga mengembangkan kepekaan terhadap kondisi sosial dan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat.

Dalam pelatihan teknis Program BSPS peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan secara terpisah, tetapi juga dilatih untuk memahami alur kerja secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan agar calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mampu menjalankan tugas secara terpadu mulai dari aspek teknis konstruksi, komunikasi sosial, dokumentasi visual, pengumpulan data lapangan hingga pengelolaan administrasi calon penerima manfaat. Dengan memahami seluruh tahapan ini secara sistemik, fasilitator diharapkan dapat bekerja secara efisien, akurat dan bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat serta melaporkan hasil kerja secara valid kepada instansi terkait.



Gambar 5. Masing-masing Calon Tenaga Fasilitas Belajar Semua Tahap dari Teknis, Komunikasi, Dokumentasi, Pengumpulan Data Lapangan dan Data Administrasi Calon Penerima Manfaat

Pada kegiatan pelatihan memperlihatkan momen penting dalam pelatihan terpadu bagi calon fasilitator. Pada sisi kiri, peserta sedang melakukan praktik dokumentasi lapangan dengan mengambil foto bangunan calon penerima manfaat, sambil didampingi oleh instruktur yang memberikan arahan teknis. Aktivitas ini melatih peserta untuk mengidentifikasi sudut pengambilan gambar yang tepat, mencatat kondisi fisik bangunan dan mengintegrasikan data visual dengan informasi teknis seperti titik koordinat dan klasifikasi kerusakan. Di sisi kanan peserta berkumpul di depan bangunan untuk melakukan simulasi pengumpulan data sosial dan administrasi, termasuk wawancara singkat, verifikasi identitas dan pencatatan formulir. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya berfokus pada satu aspek melainkan menggabungkan seluruh elemen kerja fasilitator secara simultan. Dengan metode ini peserta belajar memahami ritme kerja lapangan yang kompleks dan dinamis serta mengembangkan kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi di masyarakat. Pendekatan holistik ini menjadi fondasi penting dalam membentuk fasilitator yang profesional, kontekstual dan siap terjun langsung dalam pelaksanaan Program BSPS di berbagai wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pelatihan teknis bagi calon Tenaga Fasilitas Lapangan (TFL) Program BSPS di Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami standar rumah layak huni, teknik fasilitasi serta komunikasi sosial yang efektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, baik dari sisi teknis maupun sosial yang tercermin dalam kemampuan mereka melakukan pendampingan lapangan secara langsung dan akurat. Pelatihan ini juga memperkuat kompetensi peserta dalam dokumentasi visual, pengumpulan data dan pelaporan administrasi sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program BSPS secara menyeluruh. Dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung pelatihan ini mampu menjawab tantangan implementasi program di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks seperti Gorontalo.

Sebagai saran untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian berikutnya, pelatihan sebaiknya diperluas durasinya agar seluruh peserta memiliki waktu yang cukup untuk praktik lapangan secara merata. Perlunya disusun modul lanjutan yang fokus pada peningkatan kemampuan teknis konstruksi dan komunikasi lintas budaya mengingat latar belakang peserta yang beragam. Pendampingan pasca pelatihan juga penting untuk memastikan keberlanjutan kompetensi dan mendukung fasilitator dalam menghadapi dinamika lapangan. Model pelatihan ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian konteks lokal sebagai strategi penguatan kapasitas SDM dalam program perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, S. (2017). Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Langkat Communication Competency of

- Kecamatan Facilitator in National Program for Empowerment of Rural Mandiri Communities in Langkat. *Simbolika*, 3(1), 55–65. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>
- Astari, V. P., Bakti, H., & Ismanto, S. U. (2022). Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Bogor Tahun 2020. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 351. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41323>
- Astuti, E. D., Huda, S., & Utami, A. F. (2023). Implementasi Program BSPS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan PKE di Desa Pucangombo Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (20), 203–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8412782>.
- Dwi, R., Palilati, M. P., Selly, R., Oliy, N., & Rahman, A. (2025). Integrasi Sosialisasi dan Pendampingan Verifikasi Program BSPS di Kelurahan Tomulabutao Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (2), 1334–1344.
- Fitriah, N. I., & Witanti, A. (2023). *Fasilitator Lapangan Pada Pembangunan Infrastruktur Spald-S Menggunakan Metode Weighted Product*. 4(12), 2485–2499.
- Herawati, E., Suparjo, S., & Lestari, R. (2023). Housing Regulations For Low-Income People In Indonesia. *IJESS: International Journal of Environment Sustainability And Social Science*, 4(1), 240–249.
- Panyue, M. I., Aneta, A., & Aneta, Y. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Gorontalo. *Jambura, Journal Administration And Public Service*, 3(1), 1–10. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1492>
- Perkim, B. (2022). Petunjuk Teknis: Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Bontang. In *Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang* (p. 84). Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.
- Qalbi, A. H. D., & Adnan, M. F. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *AL-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1819–1832. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.7801>
- Rumampuk, M., Tulusan, F. M. G., & Kolondam, H. F. (2021). Kemampuan Kerja Fasilitator Dalam Pendampingan Masyarakat di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *JAP*, VII(110), 70–78.
- Silaban, T. E., & Ritonga, F. U. (2024). Tahapan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumatera Utara. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 73–79. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i2.3632>
- Sugianto, P. N., Irmayanti, D., Sri, L., & Muni, A. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Berbasis Website menggunakan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (Studi Kasus : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13004–13016. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Tasmiatun, N. E. (2024). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 620–630. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14453911>
- Tobing, P. I. L., & Wisana, I. D. G. K. (2024). Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.7454/jke.v19i1.1144>
- Utomo, S. W., & Aji, H. K. (2024). Strategi Komunikasi Fasilitator Pemberdayaan Kementerian PUPR dalam Membangun Kesadaran dan Dukungan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 8(2), 1–11.